

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan reformasi disegala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta keuangan yang lebih adil, profesional dan transparan antara tingkat pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Otonomi daerah merupakan program pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalkan kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Peranan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangga sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah. Untuk itu pemerintah pusat melakukan transfer dana kedaerah melalui beberapa mekanisme, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAK digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

Pemerolehan dan pemanfaatan DAK harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk kedalam program prioritas nasional. DAK digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pendidikan sebagai usaha sadar bagi pengembangan manusia dan masyarakat, mendasarkan pada landasan pemikiran tertentu. Dengan kata lain, upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan, didasarkan atas pandangan hidup atau filsafat hidup, bahkan latar belakang sosiokultural tiap – tiap masyarakat, serta pemikiran – pemikiran psikologis tertentu. Manusia merupakan pilar dari kemajuan suatu bangsa melalui pendidikan yang ada.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, daerah juga diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya. DAK dipakai untuk menutup

kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, insfratraktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Seharusnya sumber pendanaan tersebut digunakan secara efektif dan efesien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dilakukan secara transparan dan akuntable.

Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewewenangan. Namun dalam kenyataan dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah Dana Alokasi Khusus Pendidikan berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan PemudaDan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu?”.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan terhadap Belanja

Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak berkepentingan antara lain :

1. Bagi Pemerintahan

Sebagai bahan untuk memberikan informasi kemajuan kegiatandinas pendidikan dan meningkatkan mutu dinas pendidikan daerah.

2. Bagi Penulis

Berguna sebagai bahan terapan dan pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya mengenai pengaruh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan terhadap belanja pendidikan.

3. Bagi Peneliti Lain

Berguna sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan penelitian yaitu penelitian hanyadilakukanpadaDinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Rokan Hulu. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bantuan Dana Alokasi Khusus Pendidikan terhadap Belanja Pendidikan tahun amatan 2012-2016.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kristina Handayani (2009) berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian replikasi yaitu penelitian replikasi objeknya di Sulawesi sedangkan penelitian ini di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian replikasi tahun amatannya 2006 dan 2007 sedangkan penelitian ini tahun amatannya 2012-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan sub-bab yaitu tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan beberapa teori yang akan mendasari penulisan skripsi ini berisikan uraian teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan, populasi dan sampel, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2007). Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara keseluruhan berada pada tangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh bagian penyusunan program dan bagian keuangan.

2.1.1 Belanja Rutin

Dengan telah diberikannya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah yang telah dan akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu perlu upaya penghematan untuk biaya rutin non pegawai dengan cara prioritisasikan pembiayaan terhadap belanja yang benar-benar urgen disertai dengan peningkatan disiplin anggaran (Halim, 2007).

Belanja rutin terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja pemeliharaan

3. Belanja barang
4. Belanja perjalanan dinas
5. Belanja lain-lain, pensiun dan *ondetstand*
6. Bantuan keuangan
7. Pengeluaran tidak termasuk bagian lain
8. Pengeluaran tidak tersangka

2.1.2 Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Halim, 2007).

Kelompok belanja meliputi belanja administrasi dan umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

Belanja administrasi dan umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik dan bersifat periodik. Belanja administrasi dan umum terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.

Belanja operasi dan pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Jenis belanja ini sama dengan belanja administrasi dan umum perbedaannya pada objek belanjanya.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini terdiri dari atas jenis belanja yang hanya untuk belanja pelayanan publik. Sedangkan belanja tidak tersangka adalah belanja pemerintah daerah untuk pelayanan publik dalam rangka mengatasi bencana alam dan atau bencana sosial.

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja bidang pendidikan merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan belanja pelayanan publik. Belanja bidang pendidikan ini

bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional dan akuntabel, melibatkan masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah.

2.2 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai dengan prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ikhlas,2011).

Menurut UU No. 25 tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar didaerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab akan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan pada pemerintah daerah (Ikhlas, 2011).

Sumber utama pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dari bantuan dana alokasi khusus pendidikan. DAK yang khusus digunakan untuk membangun dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dikelola dengan baik, maka mutu pendidikan akan meningkat lebih baik. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun pendidikan yang efektif (Ditjen Dikmas, 2017).

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantu yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati, 2011).

Dana Alokasi Khusus sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBD untuk kebutuhan pegawai. Adanya Dana Alokasi Khusus pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat mempengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah. Untuk kedepan, pengelolaan DAK pendidikan sangat memerlukan perbaikan yang terarah. Bertambahnya DAK pendidikan ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan yang lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan peluang terjadinya kebocoran anggaran.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, kegiatan DAK adalah:

1. DAK Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu.

2. DAK Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, terbatas dan kepulauan, melalui jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

3. DAK Keluarga Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi program KB serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar pendistribusian penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. DAK Infrastruktur Irigasi

Dana ini untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi.

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan pelayanan penyehatan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. DAK Pertanian

Dana ini untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana pertanian, dibidang usaha tani.

8. DAK Kelautan dan Perikanan

Dana ini untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana dn sarana diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia.

9. DAK Prasarana Pemerintah Daerah

Dana ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja daerah.

10. DAK Lingkungan Hidup

Dana ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja daerah dalam lingkungan hidup.

11. DAK Kehutanan

Dana ini untuk mempertahankan dan meningkatkan daerah DAS dan kegiatan penyuluhan kehutanan.

12. DAK Sarana dan Prasarana Pendesaan

Dana ini untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk aksesibilitas.

13. DAK Perdagangan

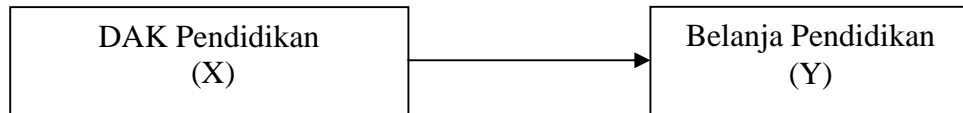
Dana ini untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional terutama diperbatasan.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi dan perbandingan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kristina Handayani (2009) berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Kabupaten/Kota Sulawesi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis (uji f untuk simultan dan uji t untuk parsial). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Pengaruh DAK terhadap belanja daerah bidang pendidikan lebih besar dibandingkan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan sehingga terjadi *Flypaper effect*.
2. Arbie Gugus Wandira (2013) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis inferensial, dan analisis regresi. Variabel independen adalah PAD, DAU, DAK, DBH sedangkan variabel independen adalah Belanja Modal. Hasil penelitian secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan Bantuan Dana Alokasi Khusus pendidikan terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu (Disdikpora Rokan Hulu), dimana variabel yang diteliti adalah dana alokasi khusus pendidikan dan belanja pendidikan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dimana penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta mengimplementasikan suatu objek dengan kenyataan yang ada tanpa dilebih-lebihkan dan menggunakan angka-angka (Sugiyono,2012).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012-2016.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Menurut Sugiyono (2013) sumber sekunder merupakan sumber data penelitian

yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulutahun 2012-2016.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai semesta penelitian (Sakaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada periode 2012-2016.

Menurut Sakaran (2006) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menetapkan untuk menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian atau disebut juga sebagai sampel jenuh atau sampel sensus sepanjang data yang diperlukan tersedia.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber sekunder yang sudah tersedia berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulutahun 2012-2016.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Agar konsep yang dipergunakan dapat diukur secara empiris serta untuk menghindari dari penafsiran yang berbeda, maka konsep tersebut perlu

didefinisikan terlebih dahulu. Variabel independen atau bebas (X) yaitu variabel yang menjadi pendugaan sedangkan variabel dependen atau tidak bebas (Y) yaitu variabel yang diperkirakan nilainya.

3.6.1 Variabel Independen (X)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti ramburambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah dan kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

3.6.2 Variabel dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah bidang pendidikan. Belanja daerah bidang pendidikan adalah bagian dari belanja daerah bidang pelayan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Atau dalam kata lain belanja bidang pendidikan merupakan pengeluaran kas daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun yang bermutu. Belanja bidang pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, professional dan akuntabel, melibatkan masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan dalam penelitian ini dikarenakan variabel bebasnya atau variable independennya hanya terdiri dari satu variabel yaitu Dana Alokasi Khusus Pendidikan. Analisis regresi linier sederhana dihitung dengan bantuan aplikasi *software* SPSS. Adapun persamaan regresi linier sederhana yaitu:

$Y = a + bX$, dimana:

Y = BelanjaPendidikan

a dan b = Bilangan Konstanta

X = Dana AlokasiKhususPendidikan

Untuk menghitung nilai konstanta a dan b digunakan rumus yaitu:

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

Keterangan:

n = Jumlah Data

2. Uji Korelasi (r)

Untuk menghitung korelasi antara kedua variabel (X dan Y) digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot (\sum XY) - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{[n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2][n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Data

Klasifikasi korelasi antara kedua variabel penelitian ditentukan dengan berpedoman kepada kriteria di bawah ini:

Tabel 3.1

Klasifikasi Korelasi Variabel Penelitian

Besarnya Koefisien	Kategori Hubungan
0,00 – 0,19	Sangat Lemah
0,20 – 0,39	Lemah
0,40 – 0,59	Cukup Kuat
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2012

3. Uji t

Untuk menentukan berpengaruh atau tidaknya variable independen terhadap variable dependen maka dilakukan uji hipotesis dengan uji t. Penelitian ini menggunakan hipotesis dimana hipotesis yang telah dibuat sebelumnya akan diuji dengan rumus:

1. t hitung, rumusnya yaitu:

$$\frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

2. t tabel, rumusnya yaitu:

t tabel = t (a/2) (n – 2) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

Adapun kriteria pengujian yang digunakan untuk menentukan berpengaruh tidaknya variabel yaitu:

1. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak berpengaruh signifikan.
2. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya berpengaruh signifikan.